

Anarki

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus
dari Universitas Monash, Australia



Buku-buku yang pernah disita polisi dikembalikan kepada pemiliknya. Buku-buku itu batal dijadikan "barang bukti" dalam penyidikan terhadap beberapa aktivis yang dituduh sebagai perusuh atau penghasut demonstrasi besar Agustus lalu.

Setelah memicu kegaduhan publik, polisi akhirnya mengakui tidak ada hubungan antara isi buku-buku itu dan kasus yang mereka tangani. Namun, apakah pengakuan ini lahir karena kesadaran baru atau karena tekanan publik dalam protes, cemooh, dan olok-olok di media? Apakah mereka sungguh membaca dan memahami isi buku-buku yang mereka sita itu?

Apakah kasus serupa mungkin menimpa buku lain dan tersangka lain di masa depan? Bulan lalu yang dianggap menakutkan adalah anarki dan marxisme. Apakah kelak akan ada buku lain bernasib sama?

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Anarki

(Sambungan dari halaman 1)

Ketika sejumlah pejabat menyamakan anarki dengan perusakan fasilitas umum, lalu menahan banyak aktivis, saya teringat pada Ketua DPR. Beberapa minggu sebelum peristiwa itu, Ketua DPR menyanyikan potongan lagu "Imagine" karya John Lennon (1971) dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI. Lagu itu, yang sering dianggap berjiwa anarkistik, mengajak manusia membayangkan dunia damai tanpa negara dan tanpa agama.

Ironis, bukan? Lagu dengan semangat anarkisme dinyanyikan pejabat tinggi negara dalam acara kenegaraan menjelang hari kemerdekaan! Jika polisi sungguh ingin memburu kaum anarkis, mengapa bukan Ketua DPR dan para anggota yang ikut bernyanyi yang ditangkap? Apakah mereka tak memahami makna lagu itu atau sebenarnya semua keributan ini tidak ada kaitannya dengan anarki?

Anarkisme memiliki banyak wajah. Intinya adalah kerinduan pada kehidupan yang damai dan sejahtera tanpa campur tangan negara atau setidaknya dengan negara yang sedikit mungkin ikut mengatur. Kaum anarkis percaya bahwa sumber malapetaka sosial adalah kekuasaan berlebihan dan aturan menyejukkan dari organisasi besar, terutama negara.

Memang, sebagian pendukung anarkisme membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan, tapi tidak semua sepakat. Hal yang sama berlaku di banyak ideologi lain: nasionalisme, agama, bahkan marxisme. Di setiap gerakan besar, selalu ada yang menjadikan kekerasan sebagai jalan perjuangan, termasuk aparat negara yang mengaku anti-anarki.

Penyebab utama demonstrasi besar Agustus lalu sebenarnya bukanlah buku apa pun, melainkan kebijakan negara dan sikap arogan para pejabat. Jika ada yang mengobarkan kemarahan rakyat, itu bukan teori anarkisme, melainkan propaganda negara sendiri. Sejak kemerdekaan, kekerasan justru dimuliakan dari satu rezim ke rezim berikutnya, terutama Orde Baru. Kekerasan menjadi fondasi bangunan negara.

Narasi revolusi kemerdekaan (1945-1949) penuh glorifikasi kekerasan. Hingga kini, banyak politisi berpidato dengan tinju mengepal dan teriakan "merdeka", seolah bangsa ini masih harus terus berperang. Kekerasan gerakan mahasiswa antikomunis (1966) yang disponsori tentara juga terus dirayakan dalam buku dan film. Dengan warisan seperti itu, wajar jika polisi kini dipandang sebagai pewaris tradisi kekerasan paling menonjol.

Ajaib, ribuan orang ditangkap, ratusan ditetapkan tersangka sebagai "penghasut". Mengapa bukan para pejabat arogan yang ditangkap, mereka yang memancing kemarahan publik dengan kebijakan tak adil? Ironi besar: tindakan represif polisi justru mengukuhkan pandangan kaum anarkis bahwa negara adalah sumber penderitaan dan malapetaka.

Akan tetapi, represi semacam ini bukan hal baru. Dari masa ke masa, banyak warga pernah menjadi korban stigmatisasi: "nekolim", "komunis", "radikal", "tidak bersih", atau "aseng". Akar sejarahnya panjang, sejak masa kolonial Belanda yang menciptakan pasal-pasal pidana "kebencian" untuk menjerat siapa pun yang berani mengkritik pejabat. Warisan itu hidup hingga hari ini.

Sebagian orang menuju polisi bodoh karena tidak membaca. Namun, mungkin bukan soal kecerdasan, melainkan sistem yang mendorong perilaku serba formalitas dan pamer prestasi. Banyak aktivis ditangkap seperti halnya dosen mengejar publikasi abal-abal demi pangkat. Mungkinkah di tubuh penegak hukum juga berlaku logika serupa? Semakin banyak tersangka, semakin gemilang karier?

Hukum sering dinilai "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Namun, yang lebih berbahaya adalah ketika batas antara yang boleh dan terlarang menjadi kabur. Di negara seotoriter pun, rakyat biasanya ingin tahu apa yang dilarang dan apa yang boleh sehingga bisa menyesuaikan diri untuk selamat. Tapi, apa jadinya jika garis itu memudar? Warga yang ingin taat pun kebingungan. Setiap orang bisa menjadi tersangka tanpa pola jelas, kapan saja, di mana saja. Di titik itulah muncul apa yang disebut terorisme negara: ketika pemerintahan dijalankan dengan menuntut kepatuhan lewat ancaman represi.

Dalam terorisme negara, hukum tetap ada dan bekerja. Hukum mengawasi, mengintimidasi, memburu, dan memidana siapa pun yang dianggap mengancam penguasa. Di situ lah, mungkin, anarki menemukan pemberarannya.